

## **BAB V PENUTUP**

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum meningkat signifikan dalam tiga pemutakhiran terakhir, menunjukkan keberhasilan penyelenggara yang mengacu pada undang-undang efektif. Langkah seperti pemilihan serentak, penjadwalan pada hari libur, dan penyesuaian dengan zaman menciptakan kondisi lebih kondusif. Selain itu, sosialisasi dan pendidikan politik meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Indikator keberhasilan pemilu terlihat dari peningkatan partisipasi yang terus meningkat berkat upaya penyelenggara dan regulasi memadai.

### **5.1 Saran**

Setelah Melaksanakan dan memberikan kesimpulan kepada penelitian terhadap Partisipasi masyarakat dalam Momentum pemilihan presiden dan wakil presiden maka penulis dapat memberikan saran, yaitu sebagai berikut

1. Kepada Penyelenggara Pemilu

Tahapan pemilihan umum sangat penting untuk keberhasilan demokrasi yang baik sehingga di harapkan dari fenomena fakta sosial terdapat beberapa tahapan pemilu tidak terlaksana dengan baik oleh penyelenggara pemilihan umum tetap berpegang teguh terhadap Asas Pemilihan Umum yaitu Langsung, Umum, Bebas, Jujur, dan Adil sehingga Demokrasi yang di laksanakan dapat memberikan Kepastian hukum Kepada Masyarakat.

2. Kepada Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan objek terpenting dalam proses demokrasi sehingga diharapkan perlu masyarakat untuk melekat hukum dan selalu aktif dalam pemilihan umum serta sadar akan pentingnya pemilihan umum untuk menentukan Arah masa depan bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- 2 Pardede, M. (2014). “Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia.” *Jurnal Rechtvinding, Vol.3, 5*.
- Bushairi. (2016). PENGETAHUAN MASYARAKAT GAMPONG TENTANG PENDIDIKAN POLITIK (STUDI KASUS: DI KECAMATAN MEURAH DUA KABUPATEN PIDIE JAYA. *Inproceeding*, <https://api.semanticscholar.org>.
- Hermawan, I. C. (2020). Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan, 10, 1*.
- Imam, F. A. N. and M. H. T. and L. N. N. (2023). Pendidikan Politik Berbasis Digital Bagi Pemuda Karang Taruna Melalui Pelatihan Pembuatan Konten Digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi*. <https://api.semanticscholar.org>
- KOMINFO. (2010). *PILKADA 2010, KPU PREDIKSI PEMILIH LEBIH DARI 70%*. KOMINFO.
- Kusmiati, I., Juliati, P., Rahmawati, F., Marezka, Lasmini, & Seran, G. G. (2024). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024. *Karimah Tauhid, 3(4)*, 4107–4118. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12693>
- Maulana, E. (2019). Perilaku Politik Masyarakat dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran. *Jurnal MODERAT, 5(3)*, 335–343.
- Mendagri Tjahjo Kumolo. (n.d.). *3 Indikator Pilkada Sukses Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo*. Pilkada Tempo.Co.
- Mhd. Al Fahjri Sukri. (2020). Dinasti Politik di Banten : Familisme, Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 10(2)*, 169–190. <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i2.8316>

- Millah, N. S., & Dewi, D. A. (2021). Skpp Bawaslu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 355–363. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1583>
- Negara, K. S. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. 182.
- Pahlevi, M. E. T., & Amrurobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6(1), 141–152.
- Ramadhan, M. isnaeni. (2015). *JABATAN wakil PRESIDEN menurut hukum tata negara*.
- Salim. (2014). *Ishak Memahami Pemilihan Umum dan Gerakan Politik Kaum Difabel*.
- Sutrisman, D. (2019). *Sutrisman, Dudih. Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*.
- Widianingsih, Y. (2017). Demokrasi dan PEMILU di Indonesia: Suatu Tinjauan dari Aspek Sejarah dan Sosiologi Politik?. *Signal*, Vol.5(No.2), 2.